

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik bertumbuh dengan sangat cepat, terlebih di Indonesia telah berlangsung setelah masa reformasi. Akuntansi sektor publik ini berkembang di Indonesia ketika pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah otonom (Hasanah *et al.*, 2019). Pemberian kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memerlukan program atau sistem yang mampu untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik. Hal tersebut akan menyebabkan munculnya sebuah sistem yang akuntabel dan terpercaya sehingga laporan atas pengelolaan keuangan daerah dapat bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melaksanakan sebuah tindakan atau terobosan untuk tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem pemerintahan yang baik (*Good governance*) mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi manajemen keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah yang diharapkan mampu dalam mewujudkan *good governance*. Sistem pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen,

yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi dapat diartikan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2004).

Pemerintah yang bertindak sebagai agen berkewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan merupakan kebutuhan transparansi sebagai syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan merupakan suatu proses akuntansi yang terstruktur dalam satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbagai pihak (Harefa, 2015). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal, sehingga laporan keuangan tidak bisa dikatakan berkualitas. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun ini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak ialah laporan hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Laporan pemeriksaan BPK atas Pemerintah Kabupaten Demak ialah pengendalian intern terkait dengan penataan aset daerah yang kurang memadai. Hal ini menjadi perhatian khusus Aparat Kabupaten Demak untuk Penataan Aset guna pencapaian tujuan Kabupaten Demak memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Surya dan Suparno (2019) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada ikhtisar hasil pemeriksaan dari tahun 2011-2015 atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah WDP. Hal tersebut berarti bahwa LKPD yang disajikan masih lemah terkait dengan penatausahaan aset daerah. Kelemahan yang terjadi pada Pemerintah Demak dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terbatas, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang belum sepenuhnya diterapkan oleh SKPD Kabupaten Demak. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai serta pengendalian intern yang baik sangat dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan agar berkualitas.

Rusvianto *et al*, (2018) menyatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Komarasari, 2016).

Kompetensi yang dimiliki SDM sangat dibutuhkan untuk penyajian laporan keuangan. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi akan mengakibatkan pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat waktu dan akan terjadi pemborosan waktu serta tenaga. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagai organisasi pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Pegawai penatausaha keuangan yang terdapat dalam SKPD harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode akuntansi. Informasi akuntansi dapat dikelola dengan baik jika pegawai penatausaha keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas.

Ihsanti (2014); Mahaputra & Putra, (2014); Rusvianto *et al*, (2018); Nasution & Andriany, (2019); Azlan *et al*, (2015); Yendrawati, (2013); Adhi & Suhardjo, (2013); Aminah *et al.*, (2019); dan Pramudityo, (2017) dalam penelitiannya tentang kualitas laporan keuangan dengan hasil yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, maka kualitas LKPD cenderung semakin baik. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Komarasari, (2016) kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kamusi (2019), melakukan penelitian di kabupaten Sika menyatakan kompetensi SDM tidak berpengaruh dikarenakan dalam proses penyusunan dibantu dengan aplikasi yang disebut SIMDA, sehingga SDM tidak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang siklus akuntansi. Andelina & Hariyanto, (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, karena kompetensi yang tinggi namun tidak sesuai bidangnya maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Faktor lain selain sumber daya manusia yang kompeten, Pengendalian Intern juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem pengendalian intern memiliki beberapa elemen penting yang digunakan untuk mewujudkan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi (Ekawati *et al.*, 2014). Salah satu elemen yaitu lingkungan pengendalian merupakan

elemen dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat, dan dapat berkembang secara wajar. Lingkungan pengendalian intern yang baik akan menjamin tersajinya pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.

Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Hal itu ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Keandalan laporan keuangan;
- c. Pengamanan aset negara; dan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Herawati, 2014). Standar ini dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004, yang

didalamnya menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem pengendalian intern harus diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian intern membantu pelaporan keuangan yang dihasilkan akan memenuhi standar yang valid, karena menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan dan ketidakberesan. Apabila sistem pengendalian intern lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam penyajian laporan keuangan akan besar. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan diteliti oleh Mokoginta *et al.*, (2017); Wahyuni & Widodo, (2019) dan Yendrawati, (2013) dengan hasil penelitian yang menunjukkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Setianingrum, (2016); Faishol, (2016); Komarasari, (2016); Kiranayanti, (2016); Pramudityo, (2017); Rusvianto *et al.*, (2018); Aminah *et al.*, (2019);

Mahaputra & Putra, (2014); Azlan *et al.*, (2015); dan Armando, (2013) melakukan penelitian yang sama dengan hasil pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi sistem pengendalian intern maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Herawati, (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan jika secara simultan, sedangkan secara parsial pengendalian intern berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi (Mowday *et al.*, 2013). Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa memiliki pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Steers (1988) mengatakan, komitmen organisasi menjelaskan kekuatan relatif dari sebuah identifikasi individu dengan keterlibatan dalam sebuah organisasi. Komitmen menghadirkan sesuatu lebih dari loyalitas terhadap organisasi, disamping itu hal ini suatu hubungan yang aktif dengan organisasi dimana individu bersedia untuk memberikan sesuatu dari diri mereka untuk membantu keberhasilan dan kemakmuran organisasi.

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti mencoba untuk melakukan pengujian ulang mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti

mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dapat diketahui bahwa beberapa faktor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Apa Saja Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan ?”**.

Perumusan masalah ini kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan ?
- 2) Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan ?
- 3) Bagaimana pengendalian intern akuntansi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
- 4) Bagaimana pengendalian intern akuntansi memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Menganalisis pengendalian intern akuntansi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Menganalisis pengendalian intern akuntansi memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang Akuntansi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.
- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di

masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya dan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.